

PENERAPAN *SMART GOVERNANCE* DALAM *SMART VILLAGE* DI KALURAHAN DLINGO, KABUPATEN BANTUL

Eno Novita Maharani^a, Dewi Sekar Kencono^b

^{a,b}Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, DIY, Indonesia

E-mail: dewisekarkencono@umy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi adanya kemajuan dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang saat ini telah dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai permasalahan di kota atau yang dikenal sebagai *smart city*. Dari *smart city* tersebut sebuah konsep baru muncul dimana konteks '*smart*' pada *smart city* yang dinilai telah berhasil mengatasi permasalahan di kota-kota yang kemudian dapat diadopsi untuk dikembangkan dalam konteks yang lebih kecil yakni pada desa atau dikenal dengan *smart village*. Sehingga diharapkan melalui konsep *smart village* tersebut maka akan dapat mengatasi berbagai permasalahan di desa. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan salah satu dimensi *smart village* yakni *smart governance* pada Kalurahan Dlingo, Kabupaten Bantul yang dinilai telah berhasil menerapkannya. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan data berasal dari wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yakni penerapan *smart governance* di Kalurahan Dlingo dilakukan melalui 3 (tiga) hal yakni yang berkaitan dengan *public service*, *transparency*, dan *policy*. Dari hal tersebut kemudian telah merubah Kalurahan Dlingo yang awalnya merupakan desa tertinggal kini menjadi desa berbasis TIK hingga menjadi rujukan studi bagi desa-desa lain di Indonesia. Dalam penerapan *smart governance* di Kalurahan Dlingo terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi yakni kepemimpinan, pendanaan, modal sosial, jejaring dan kolaborasi.

Kata Kunci: *Smart village, Smart Governance, Kalurahan Dlingo*

IMPLEMENTATION OF *SMART GOVERNANCE* IN *SMART VILLAGE* IN KALURAHAN DLINGO, BANTUL REGENCY

ABSTRACT

This research is motivated by the progress of Information and Communication Technology (ICT) which is currently being used to overcome various problems in the city or what is known as a smart city. From the smart city, a new concept emerged where the 'smart' context in the smart city was considered to have succeeded in overcoming problems in cities which could then be adopted to be developed in a smaller context, namely in the village or known as smart village. So it is hoped that through the smart village concept, it will be able to overcome various problems in the village. This study aims to see how the implementation of one of the dimensions of the smart village, namely smart governance in the Dlingo Village, Bantul Regency which is considered to have successfully implemented it. The method used is descriptive qualitative with data derived from interviews and documentation. The results of the study, namely the implementation of smart governance in the Dlingo Village were carried out through 3 (three) things, namely those related to public service, transparency, and policy. From this, it has changed the Kalurahan Dlingo which was originally an underdeveloped village to become an ICT-based village to become a study reference for other villages in Indonesia. In implementing smart governance in Dlingo Village, there are several influencing factors, namely leadership, funding, social capital as well as networking and collaboration.

Kata Kunci: *Smart village, Smart Governance, Kalurahan Dlingo*

PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang penerapan *smart village* dalam pengaplikasian terhadap konsep *smart governance* pada struktur pemerintahan desa. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi hal yang tidak bisa dihindari, bahkan tingkat penguasaan TIK menjadi salah satu indikator dari kemajuan sebuah negara (Ngafifi, 2014). Perkembangan TIK telah mempengaruhi berbagai aspek mulai dari masyarakat hingga pemerintah (Herdiana, 2019). Pemerintahan Indonesia memanfaatkan perkembangan TIK sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pemanfaatan TIK dalam proses pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yakni melalui *e-government* (Syamsul, 2018).

Kemajuan TIK juga dimanfaatkan sebagai solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dialami kota-kota di dunia (Santoso et al., 2019). Hal tersebut kemudian mendorong beberapa negara termasuk Indonesia mulai memanfaatkan TIK dengan mengintegrasikannya ke dalam elemen-elemen kota atau yang disebut dengan *smart city* (Herdiana, 2019). *Smart city* pada dasarnya merupakan penerapan TIK dalam pengelolaan sumber daya kota agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup warga kota (Baru et al., 2019).

Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia seperti melalui agenda Pembangunan Nawacita (Ella & Andari, 2018). Untuk mengoptimalkan hal tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Program Dana Desa. Melalui Program Dana Desa tersebut diharapkan pemerintah desa mampu melakukan pembangunan mandiri sesuai dengan sumber daya yang dimiliki (Ella & Andari, 2018).

Lebih lanjut, muncul konsep baru dalam pembangunan desa dimana konteks '*smart*' pada *smart city* yang dinilai telah berhasil dalam mengatasi berbagai permasalahan kemudian diadopsi untuk dikembangkan di konteks yang lebih kecil yakni pada desa atau dikenal dengan *smart village*. *Smart village* dinilai akan menjadi solusi untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa serta permasalahan lain seperti pelayanan publik yang buruk serta sulitnya masyarakat dalam mengakses informasi desa (Marlintha et al., 2018).

Smart village menurut (Viswanadham dan Vedula, 2010) yakni pemanfaatan kemajuan TIK ke dalam sekumpulan layanan yang dikelola oleh masyarakat desa dalam melakukan berbagai aktivitas sehingga lebih efektif dan efisien dengan bertumpu pada 4 (empat) dimensi, yakni *smart resource*, *smart technology*, *smart institution*, dan *smart service chain*.

Namun pada dasarnya *smart village* merupakan desa dengan kemampuan penggunaan TIK untuk mengelola dan membangun desanya secara lebih efektif dan efisien dengan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa (Baru et al., 2019). Sehingga melalui *smart village* diharapkan masyarakat desa akan memiliki kualitas hidup yang sama dengan masyarakat di kota namun dengan tetap pada kearifan lokal desa (Damayanti & Subekti, 2019).

Penerapan *smart village* di Indonesia memiliki kecenderungan pada pemanfaatan TIK dalam penyediaan inovasi layanan publik berbasis TIK, yang dalam *smart village* berkaitan dengan salah satu dimensinya yakni dimensi *smart governance*. *Smart governance* sendiri menjadi dimensi yang penting dalam *smart village*, karena berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan desa yang dilaksanakan secara '*smart*', sehingga mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien,

serta komunikatif dengan cara memanfaatkan kemajuan TIK (Subkhan et al., 2019).

Melalui penerapan dimensi *smart governance* tersebut diharapkan desa dapat mengatasi berbagai permasalahannya seperti ketimpangan pembangunan antara kota dan desa, kemiskinan, hingga permasalahan pada pemerintahan seperti pelayanan publik dan transparansinya yang buruk melalui perbaikan pada sistem pemerintahan yang lebih inovatif efektif, efisien, serta komunikatif.

Kalurahan Dlingo di Kabupaten Bantul menjadi salah satu desa/kalurahan yang menerapkan *smart governance*, yang mana penerapannya dapat dikatakan berhasil dan memiliki program berkelanjutan. Sebelum Tahun 2012, Kalurahan Dlingo sendiri merupakan desa tertinggal dan memiliki permasalahan utama yakni pemerintahannya yang nol. Hal ini terlihat pada kinerja perangkat desa yang buruk, penyediaan pelayanan publik kepada masyarakat yang sangat lama, terbatasnya transparansi informasi tentang desa yang diberikan pemerintah desa, hingga kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan untuk pembangunan desa, sehingga sejak tahun 2012 Pemerintah Kalurahan Dlingo mulai berkomitmen untuk mengatasi berbagai permasalahan ketertinggalannya (Santoso et al., 2019).

Keberhasilan penerapan *smart governance* terlihat pada perubahan Kalurahan Dlingo dalam kurun waktu 4 (empat) tahun yakni dari Tahun 2012 hingga Tahun 2016, yang awalnya merupakan desa tertinggal kini menjelma menjadi desa berbasis TIK. Hal ini juga terbukti pada tahun 2016 Pemerintah Kalurahan Dlingo mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai desa dengan pengelolaan *website* desa teraktif (Apriyansyah, 2018) dan Kementerian Dalam Negeri yang merekomendasikan Kalurahan Dlingo sebagai rujukan studi bagi desa-desa

lain di Indonesia dalam hal tata kelola pemerintahan desa (Sofyani et al., 2018).

Berdasarkan latar belakang itulah kemudian dirasa menarik untuk dilakukan penelitian terkait bagaimana penerapan *smart governance* dalam *smart village* di Kalurahan Dlingo sehingga membuat Kalurahan Dlingo mampu keluar dari ketertinggalannya dan berubah menjadi desa rujukan dengan berbagai penghargaan yang pernah diperoleh.

Penelitian terdahulu yang juga membahas terkait *smart village* misalnya penelitian dari (Park & Cha, 2019) yang membahas tren dalam implementasi *platform smart village*, penelitian dari (Mishbah et al., 2018) dan (Sutriadi, 2018) yang membahas *smart village* secara konseptual, serta (Huda et al., 2020) dan (Riawati, 2020) yang membahas program *smart* kampung di Desa Telagasari dan Banyuwangi. Persamaan terletak pada konsep utama yang digunakan yakni konsep *smart village* sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian ini lebih berfokus pada salah satu penerapan dimensi *smart village* yakni *smart governance* dengan memperhatikan adanya *public service*, *transparency*, dan *policy* di Kalurahan Dlingo, Kabupaten Bantul.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang menurut (Moleong, 2017) merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih jelas tentang objek yang diteliti (J & M, 2002). Wawancara dilakukan secara langsung dengan menemui narasumber terkait penerapan *smart governance* dalam *smart village* di Kalurahan Dlingo, yaitu

Pemerintah Kalurahan Dlingo dan masyarakat. Sedangkan dokumentasi menurut (Sugiyono, 2016) berkaitan dengan pengumpulan data-data melalui dokumen atau catatan seperti laporan, jurnal, dan *website* untuk melengkapi dan memperkuat analisis penelitian terkait penerapan *smart governance* dalam *smart village* di Kalurahan Dlingo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Smart Governance dalam Smart Village di Kalurahan Dlingo

Untuk memahami bagaimana penerapan *smart governance* dalam *smart village* di Kalurahan Dlingo, digunakan 3 (tiga) aspek pada *smart governance* menurut Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (2019) yaitu:

1. *Public Service*

Pelayanan publik pada dasarnya menjadi bagian penting dalam sebuah tata kelola pemerintahan, sehingga pemerintah memiliki kewajiban dalam memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang prima. Pemerintah Kalurahan Dlingo juga mencoba untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat sebagai sebuah upaya untuk memperbaiki kinerja pelayanan. Terdapat 3 (tiga) indikator pada aspek *public service* yaitu:

a. Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Salah satu indikator dari *smart governance* yakni adanya ketersediaan infrastruktur TIK untuk menunjang berbagai operasional Pemerintah Kalurahan Dlingo terutama dalam memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh berbagai informasi tentang kalurahan maupun informasi umum lainnya yang dapat diakses melalui internet.

Pengadaan infrastruktur TIK di Kalurahan Dlingo pertama kali dilakukan pada tahun 2013 atas inisiasi Kepala Lurah Pak Bahrin Wardoyo. Pengadaan infrastruktur TIK

pertama yakni pengadaan 16 laptop kepada setiap perangkat kalurahan dengan tujuan agar segala proses operasional administrasi kalurahan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Langkah selanjutnya yakni melakukan pengadaan tower internet dan *wifi* yang bertujuan untuk menunjang perbaikan pengelolaan *database* dan pelayanan publik kalurahan melalui pengembangan Sistem Informasi Desa (SID). Namun pada awal penerapan *smart governance* di Kalurahan Dlingo sendiri memiliki permasalahan pada keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Kalurahan Dlingo dalam bidang TIK, sehingga Pemerintah Kalurahan Dlingo memberikan pelatihan SDM bidang TIK.

Kalurahan Dlingo juga memiliki slogan “bebas internet”, yang artinya semua masyarakat bisa dengan bebas mengakses internet dengan mudah. Untuk mewujudkan slogan tersebut langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Dlingo yakni memperluas jaringan internet di seluruh wilayah Kalurahan Dlingo melalui pengadaan 3 tower internet. Selanjutnya, pengadaan tower internet tersebut akan dilanjutkan pada Tahun 2021 dengan melakukan penambahan 2 tower internet.

Pemerintah Kalurahan Dlingo sendiri memiliki target untuk membuat 10 Dukuh Kalurahan Dlingo memiliki tower internet masing-masing. Pengelolaan tower akan diserahkan kepada BUMDes melalui sistem nasabah, sehingga akan menambah pemasukan pada BUMDes Kalurahan Dlingo. Lebih lanjut, Pemerintah Kalurahan Dlingo juga telah melakukan pembangunan 9 spot *free wifi* yang ditempatkan pada tempat yang strategis di Pedukuhan Kalurahan Dlingo.

Pengadaan spot *free wifi* tersebut bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran *online* anak-anak di Kalurahan Dlingo selama masa Pandemi Covid di Indonesia. Selain itu, Pemerintah Kalurahan Dlingo saat ini juga telah memfasilitasi perpustakaan dengan seperangkat komputer untuk media

pembelajaran TIK bagi masyarakat Kalurahan Dlingo.

Gambar 1. Titik Spot *Free Wifi* di Kalurahan Dlingo



Sumber: dokumentasi peneliti

Tabel 1. Daftar Infrastruktur TIK di Kalurahan Dlingo

Masa Pemerintahan	Daftar Infrastruktur
Bahrin Wardoyo (2012-2018)	a. 16 buah laptop untuk perangkat kalurahan b. 1 buah tower internet untuk publik c. 1 <i>wifi</i> untuk publik
Agus Purnomo (2019-2023)	a. 3 buah tower di 3 Dukuh Kalurahan Dlingo b. 9 titik spot free <i>wifi</i> publik c. 1 buah komputer di perpustakaan

Sumber: hasil wawancara, 2021

Adapun dampak positif dari adanya pengadaan infrastruktur TIK yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan Dlingo dari Tahun 2013 hingga sekarang yakni adanya peningkatan kinerja dan semangat kerja Perangkat Kalurahan Dlingo dalam menjalankan pelayanan publik yang prima.

Adanya pengadaan infrastruktur TIK terutama pada pengadaan tower internet dan *wifi* juga mempermudah Pemerintah Kalurahan Dlingo dalam melakukan kegiatan pelaporan keuangan kalurahan melalui Sistem Informasi Keuangan Desa (Siskeudes). Dampak dari pembangunan infrastruktur TIK di Kalurahan Dlingo juga dirasakan langsung oleh masyarakat Kalurahan Dlingo, dimana masyarakat menjadi lebih mudah dalam memperoleh berbagai informasi tentang kalurahan maupun informasi umum melalui fasilitas internet gratis yang tersedia di

Kalurahan Dlingo. Masyarakat juga menjadi melek teknologi yang kemudian akan meningkatkan pula literasi digital untuk mengembangkan potensi diri di berbagai bidang seperti pada bidang ekonomi.

b. Penyediaan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Pemerintah Kalurahan Dlingo tidak berhenti hanya pada pengadaan infrastruktur TIK guna memperbaiki pelayanan publik di Kalurahan Dlingo, karena sebelumnya terdapat permasalahan lain yang selalu dikeluhkan oleh masyarakat yakni terkait proses pelayanan publik yang memakan waktu yang lama. Untuk memperbaiki permasalahan tersebut, Pemerintah Kalurahan Dlingo mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID).

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan sebuah program sistem olah data dan informasi berbasis komputer yang dirancang oleh *Combine Resource Institution (CRI)* yang dapat dikelola pemerintah desa. Fungsi Sistem Informasi Desa (SID) yakni, *pertama*, Media transparansi informasi; *kedua*, Media perbaikan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa; *ketiga*, Media interkoneksi antara kalurahan dengan supra desa; *keempat*, Media promosi unggulan desa.

Dampak dari adanya aplikasi SID di Kalurahan Dlingo juga telah memberikan berbagai kemudahan bagi Pemerintah Kalurahan Dlingo seperti:

- 1) Mempermudah pengelolaan *database* kalurahan melalui fitur manajemen statistik di dalam SID yang berfungsi pengumpulan, pengorganisasian, dan pemaparan data-data kependudukan.
- 2) Perubahan-perubahan pada data-data kalurahan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat.
- 3) Lebih mudah dalam memetakan dan menampung berbagai data potensi, kelemahan dan keunggulan kalurahan yang kemudian dapat dikembangkan

secara ekonomi.

- 4) Memperbaiki sistem pelayanan publik di Kalurahan Dlingo yang buruk. Sehingga bentuk pelayanan publik tersebut kini telah dapat dilaksanakan dengan lebih cepat.
- 5) Mempermudah pemberian informasi secara lebih mudah mengenai persyaratan administrasi yang harus dipersiapkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tertentu.

Dalam pengelolaan SID untuk pelayanan publik, Pemerintah Kalurahan Dlingo sangat memperhatikan kualitas dan kompetensi Perangkat Kalurahan Dlingo yang bertanggung jawab sebagai operator SID, misalnya dengan melakukan perekrutan pegawai melalui tes kemampuan komputer dan menempatkan perangkat kalurahan yang bertanggung jawab sebagai operator SID sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh mereka. Dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, Pemerintah Kalurahan Dlingo juga memperhatikan kepuasan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima.

Selain pengembangan SID, pada masa pemerintahan Lurah Agus Purnomo, Pemerintah Kalurahan Dlingo juga merencanakan inovasi baru terkait pelayanan publik berbasis TIK yakni berupa pengembangan aplikasi *Whatsapp Auto Respond* untuk lebih mengoptimalkan pelayanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat dari rumah. Pengembangan aplikasi *Whatsapp Auto Respond* tersebut telah dianggarkan oleh Pemerintah Kalurahan Dlingo melalui APBKal yakni sebesar 15 juta rupiah dan direncanakan mulai dikembangkan pada tahun 2021.

Lebih lanjut, inovasi lain terkait layanan publik berbasis TIK yang akan dikembangkan Pemerintah Kalurahan Dlingo saat ini yakni pelayanan publik dengan sistem *scanner*. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi membawa dokumen yang banyak ketika

datang ke Kantor Kalurahan Dlingo untuk mendapatkan pelayanan publik.

Dari beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengembangan inovasi terkait pelayanan publik berbasis TIK di Kalurahan Dlingo tidak hanya berhenti pada masa pemerintahan Pak Bahrun Wardoyo, namun kemudian dilanjutkan oleh Kepala Lurah Agus Purnomo. Berikut daftar pelayanan publik berbasis TIK yang telah dan akan dikembangkan di Kalurahan Dlingo:

Tabel 2. Pelayanan Publik Berbasis TIK di Kalurahan Dlingo

Produk	Konten	Pelayanan yang diakses
SID (Sistem Informasi Desa)	Pengelolaan <i>database</i>	Fitur manajemen statistik
	Layanan administrasi	Fitur cetak surat
	<i>Website</i> desa	Berbagai informasi desa seperti profil desa, potensi desa, laporan keuangan, Agenda Pemerintah Desa, kegiatan harian desa, informasi syarat administrasi, layanan aduan
<i>Whatsapp Auto Respond</i> (akan dikembangkan)	Multifungsi sebagai aplikasi pelayanan dan transparansi	Berbagai pelayanan yang bisa di akses dari rumah
Pelayanan Sistem <i>scanner</i> (akan dikembangkan)	Layanan mandiri publik	Tidak perlu lagi membawa berbagai dokumen ke Kantor Kalurahan untuk mendapatkan pelayanan

Sumber: hasil wawancara, 2021

c. Penyediaan Layanan Administrasi yang Mudah dan Cepat

Sebelum adanya Sistem Informasi Desa (SID), masyarakat Kalurahan Dlingo selalu mengalami kesulitan untuk mendapatkan pelayanan administrasi yang cepat. Hal ini dikarenakan sebelum Tahun 2012 sistem pelayanan administrasi di Kalurahan Dlingo

masih secara konvensional yang membuat proses pendataan lebih memakan waktu yang lama, sehingga sering kali masyarakat harus menunggu berjam-jam hingga keesokan harinya agar kebutuhan mereka selesai diproses oleh perangkat kalurahan. Masalah tersebut teratasi setelah dikembangkannya aplikasi SID pada Tahun 2014 di Kalurahan Dlingo. Dalam sistem SID tersebut memuat fitur cetak surat yang berfungsi untuk mempercepat proses pelayanan administrasi di Kalurahan Dlingo. Cara Perangkat Kalurahan Dlingo dalam menjalankan fitur cetak surat yakni:

- 1) Operator login terlebih dahulu ke dalam sistem SID.
- 2) Operator memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) warga di menu pencarian.
- 3) Operator SID memilih dari 34 format jenis surat yang telah disediakan dalam sistem SID sesuai dengan yang diperlukan oleh warga.
- 4) Format surat tersebut dapat diubah oleh operator SID melalui fungsi pengaturan di Menu Master Surat.
- 5) Setelah itu surat dapat dicetak dan secara otomatis telah tersiapkan di dalam sistem SID.

Pelayanan cetak surat yang disediakan dalam sistem SID tersebut yakni seperti pengurusan Surat Pengantar KK, Surat Keterangan Pindah Penduduk, Surat Keterangan Jual Beli, SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian), SKU (Surat Keterangan Usaha), Pengajuan Akte Kematian dan Akte Kelahiran, Permohonan Penduduk Masuk, Persyaratan Nikah, dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Bentuk fitur Cetak Surat dalam sistem SID seperti berikut:

Gambar 2. Fitur Cetak Surat pada SID



Sumber: dokumentasi Pem. Kalurahan Dlingo

Dampak dari adanya fitur cetak surat tersebut yakni pelayanan administrasi di Kalurahan Dlingo kini telah tergantikan dengan sistem yang lebih cepat, sehingga kini Pemerintah Kalurahan Dlingo dapat memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat dengan waktu kurang dari 5 menit pelayanan administrasi tersebut telah dapat didapatkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat selaku penerima layanan juga lebih merasa puas terhadap pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Dlingo.

Meskipun proses pelayanan administrasi di Kalurahan Dlingo sudah dapat diberikan dalam waktu yang lebih cepat, namun terkadang masyarakat masih harus mengantri cukup lama pada saat jam kantor sibuk kerja, karena sistem kerja pelayanan Kalurahan Dlingo yang masih berdasarkan sistem *shift* atau bergantian dan masih kurangnya personil dalam melakukan pelayanan administrasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kalurahan Dlingo sedang mengupayakan inovasi aplikasi *Whatsapp Auto Respond* agar dapat segera terealisasi untuk lebih mempermudah masyarakat mengurus administrasi yang dibutuhkan.

d. Penyediaan Layanan Aduan Berbasis TIK

Salah satu indikator dalam *smart governance* yakni ketersediaan layanan aduan berbasis TIK yang dapat diakses oleh masyarakat desa dengan mudah. Melalui layanan aduan berbasis TIK tersebut maka masyarakat Kalurahan Dlingo dapat lebih mudah dalam memberikan hubungan timbal balik atas kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kalurahan Dlingo dalam bentuk pemberian kritik dan saran. Sebelumnya, informasi dan komunikasi antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat hanya dilakukan melalui papan informasi di balai kalurahan, namun setelah adanya tower internet dan *wifi* yang disediakan, masyarakat dapat dengan mudah memberikan kritik dan

saran. Media yang dapat digunakan oleh masyarakat seperti:

- 1) *Group Whatsapp* yang dibuat oleh Pemerintah Kalurahan Dlingo yang akan mempermudah koordinasi antara kepala lurah, carik, para dukuh, BPD, kelompok masyarakat, serta masyarakat dalam berbagai hal terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan kalurahan.
- 2) Melalui *facebook*, dimana masyarakat dapat memberikan kritik atau saran melalui kolom komentar yang tersedia di sistem *facebook*.
- 3) Pada aplikasi SID melalui fitur *website* desa yang juga telah dimanfaatkan Pemerintah Kalurahan Dlingo sebagai media layanan aduan berbasis TIK. Masyarakat dapat memberikan saran dan kritik pada kolom komentar.

Dengan adanya berbagai media yang dapat digunakan oleh masyarakat, menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Dlingo terbuka dengan adanya kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat. Adapun dampak positif dari adanya berbagai layanan aduan berbasis TIK di Kalurahan Dlingo yakni:

- 1) Peningkatan efektifitas dalam menyelesaikan permasalahan yang langsung dapat ditindak oleh Pemerintah Kalurahan Dlingo.
- 2) Mencegah terjadi penyelenggaraan pemerintahan desa yang terpusat.
- 3) Sebagai bahan evaluasi untuk memaksimalkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 4) Masyarakat semakin menjadi kritis dan sadar akan keberadaan dirinya dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa.

Namun, keberadaan berbagai media layanan aduan berbasis TIK di Kalurahan Dlingo tersebut masih belum digunakan secara maksimal oleh masyarakat Kalurahan

Dlingo, karena masyarakat yang merasa takut untuk menyampaikan keluhan atau kritik mereka dan masih ada masyarakat yang belum melek teknologi.

2. *Transparancy*

Keterbukaan informasi kepada publik bagi Indonesia yakni merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan negara yang terbuka dan demokratis. Dalam konteks desa, keterbukaan informasi tersebut menjadi hal yang sangat diperlukan oleh masyarakat desa terutama berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan desa, karena dengan adanya keterbukaan tersebut maka masyarakat dapat memantau bentuk implementasi Dana Desa melalui berbagai kegiatan pemerintahan desa. Beberapa indikator pada aspek transparansi ini yaitu sebagai berikut:

a. **Transparansi Berbasis TIK**

Pemerintah Kalurahan Dlingo sendiri telah berkomitmen untuk selalu melakukan transparansi publik, salah satunya yakni dengan memanfaatkan SID melalui fitur *website* desa yaitu <https://dlingo-bantul.desa.id/first>. Tujuan dari transparansi tersebut yakni agar segala informasi tentang Kalurahan Dlingo dapat diakses oleh masyarakat kalurahan melalui *website* desa tersebut. Pada *website* Kalurahan Dlingo sendiri telah memuat berbagai fungsi pengelolaan konten informasi berdasarkan beberapa kategori menu yakni berita, agenda, produk hukum, perencanaan dan penganggaran, laporan, potensi dan usaha, serta panduan layanan publik.

Beberapa kategori tersebut memuat berbagai artikel yang dilengkapi dengan foto serta lampiran dokumen tertentu, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan berbagai informasi seperti syarat administrasi, APBKal, Agenda Pemerintah Kalurahan Dlingo hinggaberita harian Kalurahan Dlingo di *website* tersebut.

Adanya *website* tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kalurahan Dlingo untuk mengenalkan Kalurahan Dlingo kepada dunia luar dengan cara mempublikasikan berbagai informasi mengenai potensi yang dimiliki oleh Kalurahan Dlingo. Pemanfaatan *website* desa sebagai media transparansi berbasis TIK di Kalurahan Dlingo tersebut telah merubah kualitas informasi yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Dlingo menjadi lebih baik, yang dapat dilihat seperti pada tabel berikut:

Bukti keberhasilan Pemerintah Kalurahan Dlingo untuk terus konsistensi dalam melakukan transparansi publik melalui *website* desa yaitu berupa penghargaan sebagai desa dengan pengelolaan *website* desa teraktif pada tahun 2016 dari Pemerintah Kabupaten Bantul serta mendapat bantuan tower dan *wifi* tambahan dari Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2015.

b. Transparansi Informasi Anggaran dan Agenda Pemerintah Desa/Kalurahan

Melalui *website* Kalurahan Dlingo yang dapat diakses di <https://dlingo-bantul.desa.id/first>. Dengan adanya *website* tersebut akan lebih mempermudah Pemerintah Kalurahan Dlingo dalam menjalankan kewajibannya untuk selalu memberikan informasi terkait APBKal.

Gambar 3. Keterbukaan Informasi APBKal di *Website* Kalurahan



Sumber: *website* Kalurahan Dlingo

Gambar diatas menunjukkan bahwa Pemerintah Kalurahan Dlingo telah menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan transparansi informasi APBKal di *website* desa yang kemudian dapat di-*download* oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat secara langsung melihat laporan keuangan kalurahan, baik itu jumlah keuangan yang ada di kas, yang sudah tersalurkan melalui berbagai macam implementasi, sampai dengan sisa saldo kalurahan.

Hal ini dioptimalkan dengan tersedianya kolom komentar untuk menyampaikan kritik dan saran atas kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kalurahan Dlingo. Pemerintah Kalurahan Dlingo juga aktif melakukan sosialisasi laporan APBKal kepada masyarakat agar mereka dapat meninjau dan memastikan kesesuaian antara perencanaan keuangan dengan realisasi APBKal.

Transparansi Agenda Pemerintahan Kalurahan Dlingo juga dilakukan melalui *website*. Pemerintah Kalurahan Dlingo selalu konsisten dalam memberikan informasi terkait Agenda Pemerintah Kalurahan Dlingo sejak tahun 2014 hingga saat ini. Untuk mempertahankan konsistensi transparansi publik tersebut, Pemerintah Dlingo berusaha untuk memberikan informasi setidaknya 2 informasi dalam sehari melalui *website* kalurahan. Selain melalui *website*, transparansi terkait pengelolaan APBKal dan Agenda Pemerintah juga disampaikan dan disebarluaskan kepada masyarakat melalui berbagai media yang dimiliki oleh pemerintah kalurahan, tidak hanya secara *online* tetapi juga secara *offline*, seperti:

Tabel 3. Daftar Media Transparansi di Kalurahan Dlingo

Jenis	Media	Sifat
Offline	Papan Informasi	1 Arah
	Radio Komunitas Sandigita IT	2 Arah
	Banner atau Baliho	1 Arah

Online	Website Kalurahan	2 Arah
	Whatsapp Group	2 Arah
	Facebook	2 Arah

Sumber: hasil wawancara, 2021

Dampak positif dengan adanya berbagai bentuk pengoptimalan media transparansi publik yang tersedia di Kalurahan Dlingo yakni penyelenggaraan pemerintahan akan semakin dapat dipertanggung jawabkan berkat adanya pengawasan publik melalui keterbukaan tersebut. Selain itu, melalui berbagai media transparansi tersebut masyarakat kalurahan lebih mudah dalam mengawasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Dlingo, sehingga berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan Kalurahan Dlingo.

3. Policy

a. Optimalisasi Partisipasi Publik dalam Kegiatan Pembangunan Desa

Salah satu indikator dalam *smart governance* yakni adanya keterlibatan masyarakat desa dalam pengambilan kebijakan pada level desa. Pemerintah Kalurahan Dlingo mengupayakan keterlibatan masyarakat pada pembangunan desa dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan kalurahan seperti:

1) Perencanaan pembangunan kalurahan

Proses perencanaan dilakukan secara berjenjang dan bertahap mulai dari musyawarah RT, musyawarah dukuh, hingga musyawarah desa. Pada musyawarah tingkat RT dan dukuh, masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan berbagai kebutuhan diberbagai bidang, dan dari musyawarah tersebut berbagai saran dari masyarakat akan ditampung yang kemudian akan dibahas pada musyawarah desa untuk ditentukan skala prioritas pelaksanaan pembangunan.

Beberapa bentuk partisipasi masyarakat Kalurahan Dlingo pada proses ini misalnya pada pembentukan objek wisata, pembangunan balai dusun, hingga perbaikan jalan dusun dan yang baru-baru ini dilaksanakan yaitu sosialisasi pembangunan Balai Budaya.

- 2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan Keterlibatan masyarakat pada tahap ini dilakukan dengan cara gotong royong. Kegiatan gotong royong pembangunan kalurahan misalnya gotong royong membangun balai dusun, perbaikan jalan dusun dan realisasi pembentukan objek wisata di Kalurahan Dlingo yang bahkan dilibatkan dari tahap identifikasi potensi hingga pengelolaan objek wisata tersebut. Saat ini Kalurahan Dlingo telah memiliki beberapa objek wisata atas prakarsa masyarakat, yaitu *River Tubing* Njogo Payoh di Dusun Pakis I dan wisata alam Grojogan Tepo di Dusun Pokoh II. Keterlibatan masyarakat Kalurahan Dlingo dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan yang baru-baru ini terjadi yakni kegiatan gotong royong pembangunan bangket jalan di Dusun Dlingo I untuk mempermudah setiap akses jalan di Kalurahan Dlingo.
- 3) Pembentukan TPK Dusun Pemerintah Kalurahan Dlingo pada masa pemerintahan Lurah Agus Purnomo telah membentuk 15 TPK Dusun. TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) merupakan tim yang ditetapkan oleh kepala desa berdasarkan keputusan desa. TPK Dusun terdiri atas ketua, sekretaris, pengawas dan anggota yang berasal dari masyarakat Kalurahan Dlingo yang tujuannya agar setiap kegiatan yang dilakukan di Kalurahan Dlingo dapat diselesaikan dalam waktu bersamaan.
- 4) Pembentukan staff khusus pembuat proposal Staff pembuat proposal beranggotakan masyarakat Kalurahan Dlingo yang

dibentuk untuk memudahkan masyarakat Kalurahan Dlingo dalam hal perencanaan kegiatan.

Dari penjelasan di atas, dapat terlihat bahwa dalam penerapan *smart governance* di Kalurahan Dlingo tidak hanya sebatas melakukan pengadaan berbagai infrastruktur TIK yang cerdas, namun juga terus berusaha untuk membentuk masyarakat kalurahan yang cerdas dan mandiri melalui pengoptimalan partisipasi masyarakat kalurahan dalam segala kegiatan pembangunan kalurahan.

Faktor yang Berpengaruh dalam Penerapan Smart Governance dalam Smart Village di Kalurahan Dlingo

Dalam proses penerapan *smart governance* dalam *smart village* di Kalurahan Dlingo, terdapat faktor-faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan penerapan *smart governance* di Kalurahan Dlingo tersebut, yakni:

1. Faktor Kepemimpinan

a. Kepemimpinan Bapak Bahrum Wardoyo (2012-2018)

Bapak Bahrum menjadi pemimpin yang berpengaruh di Kalurahan Dlingo, karena beliau adalah yang pertama kali menginisiasi penerapan dan peningkatan *smart governance* di Kalurahan Dlingo. Beberapa peran, program, kegiatan dan pengadaan yang dilakukan di masa kepemimpinannya yaitu sebagai berikut:

- 1) Pengadaan infrastruktur TIK
- 2) Perperan dalam mengarahkan pengelolaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan kalurahan yang tepat sasaran
- 3) Pembentukan BUMDes Giritama sebagai bentuk pengembangan ekonomi desa
- 4) Mengarahkan masyarakat untuk selalu ikut dan aktif dalam proses perencanaan pembangunan
- 5) Pelestarian nilai budaya lokal yang ada di Kalurahan Dlingo seperti terus mengadakan Merti Dusun Kalurahan Dlingo

- 6) Pembentukan komunitas Sandigita IT untuk mengatasi efek negatif dari adanya proses penetrasi TIK ke dalam Kalurahan Dlingo pada kaum muda

Sehingga melalui berbagai peran Pak Bahrun Wardoyo tersebut, Kalurahan Dlingo mengalami perubahan pesat dalam kurun waktu 4 tahun (2012-2016) yang awalnya sebagai desa tertinggal kini menjelma sebagai desa berbasis TIK hingga direkomendasikan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai rujukan studi bagi desa-desa lain dalam hal tata kelola pemerintahannya.

b. Kepemimpinan Bapak Agus Purnomo (2018-2023)

Lurah pada masa jabatan 2018-2023 yakni Pak Agus Purnomo juga sangat berpengaruh terutama dalam hal mempertahankan dan terus mendorong berbagai bentuk pengoptimalan pembangunan TIK di Kalurahan Dlingo. Peran, program, kegiatan dan pengadaan yang dilakukan yaitu sebagai berikut:

- 1) Penambahan infrastruktur TIK dan merencanakan inovasi pelayanan publik
- 2) Pengoptimalan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan melalui TPK Dusun dan Staf Pembuat Proposal
- 3) Melakukan pembangunan untuk pelestarian budaya lokal Kalurahan Dlingo dengan merintis Sekola Budaya

Upaya-upaya dan berbagai inovasi terus dilakukan oleh Bapak Agus Purnomo guna membentuk dan mewujudkan Kalurahan Dlingo yang menerapkan *smart governance* untuk kemudahan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Faktor Pendanaan

Pendanaan menjadi bagian penting dalam hal penerapan *smart governance* di Kalurahan Dlingo. Dengan adanya pengelolaan dana yang tepat berdasarkan analisis kebutuhan masyarakat, maka akan mencegah terjadinya pemborosan dana terutama dalam hal kegiatan

pembangunan infrastruktur TIK yang akan memerlukan pembiayaan yang banyak.

Pada Kalurahan Dlingo, pendanaan kegiatan awal penerapan *smart governance* yakni bersumber dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan ADD (Alokasi Dana Desa) yang digunakan dalam berbagai kegiatan pengadaan infrastruktur TIK dan insentif bagi staf bidang TIK yang dilakukan pada tahun 2013. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian muncul Program Dana Desa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat untuk membantu desa mengatasi ketertinggalannya.

Kalurahan Dlingo menerima Dana Desa pertama kali pada bulan Agustus 2015 dengan jumlah 800 juta rupiah dengan syarat telah membuat RKP dan APBDes. Dana Desa yang diberikan kepada Pemerintah Kalurahan Dlingo sangat membantu dalam berbagai pembangunan di Kalurahan Dlingo terutama pada bidang ekonomi dengan membangun gedung BUMDes.

Dana Desa kemudian digunakan untuk berbagai bentuk pemberdayaan SDM Perangkat Kalurahan Dlingo, serta SDM masyarakat Kalurahan Dlingo di berbagai bidang. Sehingga dalam penggunaan Dana Desa pertama kali di Kalurahan Dlingo yaitu 60 persen untuk pembangunan non fisik dan 40 persen untuk pembangunan fisik, dan hingga saat ini Dana Desa juga digunakan oleh Pemerintahan Kalurahan Dlingo pada masa pemerintahan Pak Agus Purnomo untuk berbagai pembangunan infrastruktur TIK di Kalurahan Dlingo.

3. Modal Sosial

Modal sosial yakni berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi faktor yang menentukan keberhasilan dari sebuah penerapan *smart governance*. SDM yang diperlukan dalam penerapan *smart governance* yaitu SDM yang memiliki pengetahuan atau melek TIK. SDM di Pemerintahan Kalurahan Dlingo (perangkat desa) dapat dikatakan sudah melek TIK dan

dapat mengelola SID dengan baik dalam menjalankan berbagai tugasnya. Hal ini karena Pemerintah Kalurahan Dlingo rutin mengadakan berbagai pelatihan bidang TIK yang diberikan kepada operator SID dengan tujuan mengoptimalkan kompetensi mereka dalam mengelola SID.

Pemerintah Kalurahan Dlingo juga melakukan berbagai pemberdayaan pada SDM masyarakat Kalurahan Dlingo melalui berbagai bentuk kegiatan edukasi dibidang TIK seperti cara menggunakan laptop dan cara mengakses internet untuk mendapatkan berbagai informasi. Kegiatan edukasi pada masyarakat kalurahan tersebut dilakukan Pemerintah Kalurahan Dlingo dengan dibantu oleh salah satu Kelembagaan Kalurahan Dlingo yakni Sandigita IT.

4. Jejaring dan Kolaborasi

Kolaborasi atau kerjasama merupakan strategi yang dapat membantu dalam mendukung kapasitas desa serta mempermudah segala proses perencanaan, pembangunan hingga pemberdayaan desa. Bentuk kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kalurahan Dlingo merujuk pada konsep *Pentahelix* yang merupakan bentuk kolaborasi **5. Unsur subjek atau stakeholder yakni *academian, business, community, government, dan media*** yang dinilai dapat mempercepat pengembangan potensi di pedesaan.

Beberapa pihak yang diajak bekerjasama yaitu:

a. **Government: Pemerintah Kabupaten Bantul melalui DisKominfo**

Pemerintah Kabupaten Bantul melalui DisKominfo Bantul berkolaborasi dengan *Combine Resource Institution* (CRI) untuk melakukan pengembangan SID di seluruh kalurahan di wilayah Kabupaten Bantul. Pada Kalurahan Dlingo, DisKominfo Bantul juga membantu dalam penyediaan tower internet dan *wifi* tambahan untuk keperluan operasional Pemerintah Kalurahan Dlingo serta berperan dalam pemberdayaan SDM

Pemerintah Kalurahan Dlingo pada bidang SID melalui kegiatan pelatihan pengelolaan SID yang dihadiri oleh 75 desa yang berada di Kabupaten Bantul termasuk Kalurahan Dlingo.

b. Community: Combine Resource Institution (CRI)

CRI atau *Combine Resource Institution* merupakan lembaga non pemerintah selaku pemrakarsa Sistem Informasi Desa (SID) sejak tahun 2009. CRI menjadi aktor yang sangat berperan besar dalam memperkenalkan dan mengembangkan aplikasi SID di Kalurahan Dlingo guna memperbaiki sistem pelayanan publiknya. CRI juga berperan dalam memberikan pelatihan operator SID Kalurahan Dlingo melalui kegiatan Sekolah Sistem Informasi Desa (SSID).

c. Academian: Program Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Bentuk kerjasama lain yakni bersama dengan Kelompok KKN Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang dilakukan pada masa pemerintahan Pak Bahrun Wardoyo yakni selama 5 tahun berturut-turut. Salah satu peran Kelompok KKN UMY tersebut yakni membantu dalam mengumpulkan berbagai data potensi yang berada di Kalurahan Dlingo, sehingga data tersebut dapat diolah untuk mengembangkan berbagai bidang ekonomi seperti kuliner dan wisata.

d. Media: KBR

KBR merupakan media jurnalisme *independent* di Indonesia sejak tahun 1999. Pada Kalurahan Dlingo, KBR berperan dalam mempromosikan Kalurahan Dlingo melalui artikel berita yang mereka terbitkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, penerapan *smart governance* di Kalurahan Dlingo sudah berjalan dengan baik dan secara nyata diterapkan di Kalurahan Dlingo sesuai dengan indikator pada *smart governance* yakni *public*

service, transparency, dan policy. Pada *public service*, Pemerintah Kalurahan Dlingo melakukan berbagai pengadaan infrastruktur TIK dan pengembangan SID yang kemudian menjadi produk unggulan Pemerintah Kalurahan Dlingo dalam melakukan pelayanan publik yang prima.

Pada *transparency*, Pemerintah Kalurahan Dlingo mengandalkan SID melalui fitur *website* desa dengan alamat <https://dlingo-bantul.Kalurahan.id/>. Melalui *website* desa tersebut, Pemerintah Kalurahan Dlingo dapat secara konsisten memberikan informasi terkait APBKal dan Agenda Pemerintah Kalurahan Dlingo. Pada *policy*, Pemerintah Kalurahan Dlingo berusaha untuk terus mengoptimalkan partisipasi masyarakat kalurahan dalam kegiatan pembangunan kalurahan, seperti partisipasi pada perencanaan dan pelaksanaan kegiatan/program, pelatihan dan sosialisasi, pembentukan TPK Dukuh serta staff khusus pembuat proposal.

Ada 4 faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan penerapan *smart governance* tersebut yakni faktor kepemimpinan, faktor jejaring dan kolaborasi, faktor modal sosial, dan faktor pendanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyansyah. (2018). *Efektivitas Sistem Informasi Kalurahan (SID) Dalam Pelayanan Publik di Kalurahan Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul Tahun 2016*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Baru, V. P., Djunaedi, A., & Herwangi, Y. (2019). *Tahap Pengembangan Smart Kampung di Kalurahan Ketapang Kabupaten Banyuwangi*. *Jurnal Planoeath*, 4(2), 68.
- Damayanti, R., & Subekti, T. (2019). *Penerapan Model Smart Village dalam Pengembangan Kalurahan Wisata: Studi pada Kalurahan Wisata Boon Pring Sanankerto Turen Kabupaten Malang*.

- Journal of Public Administration and Local Governance, 3(1), 18–28.
- Ella, S., & Andari, R. N. (2018). *Developing a Smart Village Model for Village Development in Indonesia*. Proceeding - 2018 International Conference on ICT for Smart Society: Innovation Toward Smart Society and Society 5.0.
- Herdiana, D. (2019). *Pengembangan Konsep Smart Village bagi Kalurahan-Kalurahan di Indonesia*. Iptek-Kom, 21(1).
- Huda, H. A., Suwaryo, U., & Sagita, N. I. (2020). *Pengembangan Kalurahan Berbasis Smart Village (Studi Smart Governance Pada Pelayanan Prima Kalurahan Talagasari Kabupaten Karawang)*. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan 6(3).
- J, L., & M, A. M. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif (17th ed.)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Marlintha, A. B., Irawan, B., & Latuconsina, R. (2018). *Design And Implementation Of Smart Village Mapping Geographic Information System Based Web In The Cinunuk Village*. APWiMob 2017 - IEEE Asia Pacific Conference on Wireless and Mobile, Proceedings, 66–71.
- Mishbah, M., Purwandari, B., & Sensuse, D. I. (2018). *Systematic Review and Meta-Analysis of Proposed Smart Village Conceptual Model: Objectives, Strategies, Dimensions, and Foundations*. International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI), 127–133.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif (36th ed.)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ngafifi, M. (2014). *Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*. Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi, 2(1), 33–47.
- Park, C., & Cha, J. (2019). *A Trend on Smart Village and Implementation of Smart Village Platform*. International Journal of Advanced Smart Convergence, 8(3), 177–183.
- Riawati, N. (2020). *Model Pengembangan Pelayanan Kalurahan Terintegrasi (Studi pada Kabupaten Banyuwangi dan Bondowoso Provinsi Jawa Timur)*. Media Trend Journal, 15(1).
- Santoso, A. D., Fathin, C. A., Effendi, K. C., Novianto, A., Sumiar, H. R., Angendari, D. A. D., & Putri, B. P. (2019). *Kalurahan Cerdas: Transformasi Kebijakan dan Pembangunan Kalurahan Merespon Era Revolusi Industri 4.0*.
- Sofyani, H., Suryanto, R., Wibowo, S. A., & Widiastuti, H. (2018). *Praktik Pengelolaan dan Tata Kelola Pemerintah Kalurahan Dlingo di Kabupaten Bantul: Pembelajaran dari Kalurahan Percontohan*. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 1(1), 1–16.
- Subkhan, F., Teddy, S., Lubis, F., Kusdaryanto, H., Kautsar, F. R., Endah, H. S., & Bachtiar, R. (2019). *Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City: Gerakan Menuju 100 Smart City Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (23rd ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Sutriadi, R. (2018). *Defining Smart City, Smart Region, Smart Village, And Technopolis As An Innovative Concept In Indonesia's Urban And Regional Development Themes To Reach Sustainability*. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 202(1).
- Syamsul, A. (2018). *Adopsi Inovasi Teknologi Dalam E-Government*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Viswanadham, N., & Vedula, S. (2010). *Design of Smart Villages. The Centre for Global Logistics and Manufacturing Strategies, 1–16*.